

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 17 Agustus 2024 telah disepakati rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025:

Mengingat

- 12 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 11);

Memperhatikan: 1. Surat

- 1. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 100.3/1641/HKM/2024, Tanggal 18 Agustus 2024, Perihal Penyampaian Hasil Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Kab. Tanjab Barat Tahun 2025;
- 2. Surat Badan Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 170/ 34 /BAPEMPERDA/2024 tanggal 17 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Rapat Bapemperda;
- 3. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 23 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kuala Tungkal pada tanggal : 23 Agustus 2024

KETUA DPRD

TABUPATRA TANJUNG JABUNG BARAT,

ABDULLAH

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Sdr. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

2. Arsip. _____

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 13 TAHUN 2024

TENTANG: PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH | PEMRAKARSA | KET |
|----|--|------------|-----------|
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Barang) | | Lanjutan |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Barang). | PEMDA | Baru |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2055. | PEMDA | Baru |
| 4. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. | PEMDA | Baru |
| 5. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | PEMDA | Perubahan |
| 6. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024. | PEMDA | Baru |
| 7. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025. | | Baru |

| 8. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026. | PEMDA | Baru |
|-----|---|-------|-----------|
| 9. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | DPRD | Baru |
| 10. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | DPRD | Perubahan |
| 11. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah | DPRD | Perubahan |
| 12. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | DPRD | Perubahan |
| 13. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan | DPRD | Perubahan |



+